

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian ini penulis memerlukan suatu tinjauan pustaka yang berasal dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dengan topik dan pembahasan yang relevan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dengan adanya peninjauan terhadap penelitian terdahulu diharapkan sebagai acuan penulis untuk melakukan penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Alistair et.al. (2002) dengan judul “Class matters”: human and sosial capital in the entrepreneurial process. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri peran keluarga dalam menciptakan modal manusia dan modal sosial dan mempelajari dampaknya bagi proses usaha yang mempengaruhi keuntungan dan pertumbuhan perusahaan yang baru. Melalui pendekatan kualitatif, para peneliti menemukan bahwa para wirausaha dari kelompok-kelompok yang berasal dari sosial ekonomi yang tinggi memiliki modal yang tinggi pula, sehingga bisa bertahan dengan usahanya dibandingkan dengan kelompok yang berasal dari ekonomi yang kurang. Secara signifikan usaha kelompok ekonomi sosial tingkat atas kegiatan mereka ditunjang dengan persediaan modal yang cukup tinggi. Akibatnya, pengusaha dari kelas ekonomi yang tinggi memiliki akses dan dukungan yang lebih efektif dan jaringan yang luas. Kesimpulannya, bagi yang ingin membuka usaha sebaiknya memiliki persediaan sumber daya modal yang mencukupi untuk bisa mempertahankan usaha yang telah ada.

Abdul Hakim (2011) dalam jurnal berjudul “Strategi Kelangsungan Hidup Perempuan Mantan Buruh Migran (Studi Kasus Mantan Buruh Migran Kaliwedi Kabupaten Cirebon)” Analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Data lapang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan pengamatan. Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah reduksi, display dan analisis. Hasil penelitian ini adalah persoalan kemiskinan yang tidak kunjung usai dan sempitnya lapangan kerja mendorong para wanita Desa untuk melakukan migrasi. Ketika menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), para TKW bisa mengumpulkan modal untuk membeli tanah, membangun rumah serta membuka usaha setelah pulang ke

kampung halaman. Para mantan TKW awalnya mengalami masa liminalitas ketika kembali ke kampung halaman yang berdampak pada usaha memulai kerja di Desa, perubahan status sosial dan pekerjaan.

Rahmi Garnasih (2011) dalam skripsi berjudul “Peran Modal Sosial dalam Pemberdayaan Perempuan pada Sektor Informal (Studi Kasus Pada Pedagang Warung Nasi). Metode yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data, wawancara, dan observasi pedagang perempuan yang berlokasi di pasar. Permasalahan yang diambil oleh peneliti ialah mengetahui gambaran modal sosial dan perannya terhadap pemberdayaan perempuan pada sektor informal. Teori yang digunakan adalah modal sosial yang terdiri dari norma, jaringan yang akan dilihat pada perempuan yang bekerja sebagai pedagang di warung nasi di Pasar. Hasil dari penelitian ini ialah pedagang mencerminkan norma informal berlanjut kepada timbulnya *trust* diantara pedagang dengan pihak yang saling berinteraksi dengan pedagang sehingga adanya nilai-nilai yang dibangun bersama. Tindakan aturan-aturan informal yang berlaku dikelompok pedagang mampu mereka patuhi bersama, meskipun tidak ada perjanjian tertulis. Sehingga aturan informal tersebut menjadi norma-norma tersendiri yang berkembang serta dilaksanakan bersama-sama.

Naning Kristiyana dan Choiril Hamidah (2013) dalam jurnal berjudul “Transisi Peran TKI Purna di Ponorogo dari Buruh Menjadi Wirausahawan dan Tuan Tanah” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diambil dari penelitian ini ialah pengamatan dan wawancara. Tujuan dari penelitian ini ialah 1) Mengetahui tahapan-tahapan penting yang telah dijalani oleh TKI Purna di Ponorogo sehingga mereka menjadi wirausaha serta tuan tanah, 2) Mengetahui kendala-kendala yang harus dihadapi TKI purna di Ponorogo dalam mencapai keberhasilan suatu wirausaha maupun sebagai tuan tanah; dan 3) Mengetahui pihak mana saja yang berperan secara langsung maupun tidak langsung terhadap transisi peran TKI Purna di Ponorogo dari buruh sampai menjadi seorang wirausaha maupun tuan tanah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tahap-tahap penting TKI purna dari buruh menjadi Wirausaha dan tuan tanah yaitu; 1) Menabung hasil kerja ke Luar Negeri, 2) Memulai investasi sederhana, seperti mencari informasi tentang peluang usaha yang ada di Ponorogo, 3) memberanikan

diri untuk membuka usaha, 4) Melibatkan seluruh anggota keluarga untuk membuka suatu usaha, 5) menambah tenaga kerja ketika usaha mulai berkembang. Sedangkan kendala-kendala yang pada umumnya dihadapi dalam menjalankan usaha diantaranya; Memilih jenis usaha yang memiliki peluang besar di Ponorogo, memperoleh tambahan modal, beberapa kali harus ganti usaha, serta keterbatasan kemampuan wirausaha para TKI purna.

Supratiwi (2013) dalam jurnal berjudul “Peranan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus di Desa Bender, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati)”, Metode analisa data yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif yang mengungkapkan fenomena sosial politik dengan jelas dan cermat. Sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang mencakup masyarakat yang ada di desa Bender tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah berbagai modal sosial yang dimiliki masyarakat Bender dilihat dari aspek ekonomi, modal sosial hubungannya dengan aspek sosial, modal sosial hubungannya dengan aspek cultural, dan modal sosial hubungannya dengan aspek peranan perempuan. Modal sosial dari aspek sosial adalah kekuatan system kekeluargaan yang ada pada masyarakat Bender. Dengan system kekerabatan yang erat, kehidupan masyarakat berlangsung dengan akrab sehingga dapat memudahkan kerjasama yang dilaksanakan. Dari aspek cultural, nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat Bender adalah sifat kerja keras dan keuletannya. Adapun dari aspek ekonomi, modal sosial yang dimiliki masyarakat Bender adalah terbentuknya banyak paguyuban atau lembaga perekonomian berdasarkan profesi. Kesimpulannya, Modal sosial berhubungan dengan kepercayaan, nilai, system bagi hasil, dan peran meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena faktor internal. Modal sosial dapat menggerakkan partisipasi masyarakat sehingga bisa terjalinnya kekerabatan yang erat dan kerjasama yang akan dilaksanakan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu diatas merupakan sebagai pendukung untuk penulis dalam melakukan penelitian selanjutnya. Kesamaan pada penelitian diatas ialah penelitian terkait tentang peran modal sosial untuk mengembangkan usaha dan TKW purna memanfaatkan modal untuk membuka usaha dan lainnya. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah pada

objek penelitian yang berbeda yakni pekerja migran wanita (PMW) purna dan lokasi penelitian juga dilakukan di Desa Pojok, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.

2.2 Teori

2.2.1 Peran

Menurut Simatupang (2002) Peran merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang menjadi perhatian dalam kajian sosiologi dan beberapa kajian ilmu lainnya. Istilah Peran mempunyai berbagai pengertian dan batasan yang dapat dipahami. Beberapa pengertian tentang peran yang dikemukakan oleh beberapa ahli diartikan sebagai upaya masyarakat dalam suatu kegiatan. Peran juga merupakan aspek dinamis dari status dan apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut menjalankan sebuah peran (Palit, 2009).

Menurut Astuti (dalam Alghaasyiyah:2014) Adapun tiga pembagian peran yang terdapat di dalam suatu masyarakat yakni :

1. Peran produktif

Peran produktif adalah kegiatan kerja yang menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang atau jasa yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Peran ini identik sebagai peran wanita di sektor publik contohnya seperti petani, penjahit, buruh, guru dan pengusaha.

2. Peran reproduktif (domestik)

Peran reproduktif adalah kegiatan kerja yang menjamin keberlangsungan hidup manusia dan keluarga seperti mengasuh anak, memasak, melahirkan, dan lain sebagainya. Peran ini pada akhirnya diikuti dengan mengerjakan kewajiban mengerjakan pekerjaan rumah.

3. Peran sosial

Peran sosial pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan dari para ibu rumah tangga untuk mengaktualisasikan diri dalam masyarakat.

Dalam teori Structural Fungsional, menurut Parsons, 1985 (dalam Wisadirana, 2005), memberikan gambaran mengenai perbedaan pola peranan antara laki-laki (sebagai suami) dan perempuan (sebagai istri) dalam suatu rumah

tangga memiliki model peran instrumental dan peran ekspresif. Peran instrumental digambarkan sebagai peran yang berorientasi eksternal yang digunakan untuk mencapai tujuan keluarga dan pada peran ini dilakukan oleh suami, Sebaliknya peran yang digambarkan sebagai peran ekspresif yang berorientasi internal dan ditunjukkan untuk memelihara keseimbangan keluarga dilakukan oleh istri atau kaum perempuan. Pola peranan yang digambarkan tersebut digunakan atas dasar untuk memahami proses sosialisasi dan diferensiasi peranan menurut jenis kelamin, atau seks yang berguna untuk mempertahankan keseimbangan keluarga dan system sosial secara keseluruhan.

Peran wanita dalam aspek sosial terdapat dua peran yaitu peran wanita dalam keluarga dan peran wanita pada masyarakat. Peran ialah bagian yang dimanfaatkan seseorang pada setiap saat dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri dengan keadaan. Peran wanita yaitu bagian dari tugas utama yang harus diselesaikan oleh wanita. Ada berbagai peran wanita yang dimiliki sejak lahir sampai pada usia-usia berikutnya. Peran juga merupakan bagian dari hidupnya. (Sugihasti, 2000 : 121)

Dapat disimpulkan dari menurut para ahli diatas, peran merupakan suatu kedudukan atau status seseorang. Apabila seseorang tersebut menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan perannya. Setiap pribadi seseorang memiliki peran yang berbeda-beda. Maka seseorang tersebut menjalankan perannya sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

2.2.2 Modal Sosial

Modal sosial adalah bahwa dalam modal sosial dapat digunakan untuk mengukur dan mengikat hubungan antar komunitas, organisasi dan masyarakat. Menurut Putnam (2002) menyatakan bahwa modal sosial mengacu pada esensi dari organisasi sosial, seperti *trust*, norma, dan jaringan sosial yang memungkinkan pada suatu kegiatan akan terkoordinasi, dan anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan bekerjasama secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama dan mempengaruhi produktivitas secara individual maupun kelompok. Dalam Demarto, dkk (2014:3) menyebutkan bahwa modal sosial merupakan bagian-bagian organisasi sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi

tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Modal sosial juga didefinisikan sebagai kemampuan yang muncul dari kepercayaan umum didalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu dalam masyarakat atau pada kerangka kecil seperti suatu organisasi. Modal sosial juga serangkaian nilai dan norma yang dimiliki bersama diantara para masyarakat suatu kelompok yang memungkinkan akan terjalinnya kerjasama.

Pengertian modal sosial menurut Vipriyanti (2011) tentang modal sosial ialah bahwa modal sosial dapat digambarkan menjadi suatu keadaan dimana individu dapat menggunakan keanggotaannya dalam suatu kelompok untuk memperoleh manfaat. Modal sosial ini tidak dapat dievaluasi tanpa mengetahui dimana setiap individu berada, karena interaksi sosial tergantung pada struktur jaringan kerja dan struktur masyarakat. Sedangkan menurut Francis Fukuyama (2002) modal sosial menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu segala sesuatu membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, dan didalamnya diikat pada nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi.

Modal sosial mengamsumsikan sumber daya yang terdapat dalam salah satu hubungan sosial yang dapat digunakan untuk mendukung suatu kewirausahaan, yang diekspetasikan pada kepastian penjelasan yang lebih jelas tentang fenomena dan mengungkapkan tambahan wawasan untuk keberhasilan pada pembangunan kewirausahaan agar dapat berkembang (Zhao et. Al, 2011). Pada modal sosial tersebut hasil kerja sama dalam mengembangkan suatu kewirausahaan seperti, kepercayaan, serangkaian nilai dan norma yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Karena dalam membangun suatu kewirausahaan tidak bisa bekerja dengan individual tetapi harus membutuhkan bantuan dari orang. Maka dibutuhkan modal sosial untuk menjalin kerjasama antar kelompok.

Pengertian tentang modal sosial yang telah dikemukakan oleh pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa modal sosial merupakan kerjasama individu maupun antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya modal sosial dalam suatu kelompok seperti, kepercayaan, nilai, norma-norma, jaringan, partisipasi antar masyarakat, hubungan timbal balik, hal tersebut memungkinkan untuk melakukan kerjasama antar kelompok sehingga menjalankan

kerjasama dengan baik dengan adanya modal sosial tersebut. Dalam modal sosial ini diperlukan untuk mengembangkan usaha sehingga usaha tersebut berjalan dengan lancar. Memakai kepercayaan yang diberi untuk menjalankan usahanya, usaha tidak akan berjalan sempurna jika dilakukan secara individu. Selain itu membutuhkan jaringan sosial sebagai komunikasi yang baik untuk mengembangkan suatu usaha. Jaringan sosial mengharuskan dalam membentuk hubungan sosial dan interaksi agar terjalinnya kerjasama antar individu maupun antar kelompok. Serta nilai dan norma yang harus dipatuhi oleh individu maupun kelompok, jika tidak maka ada sanksi sosial yang diberikan sehingga tidak mengulangi kembali kedepannya.

2.2.3 Dimensi Modal Sosial

Modal sosial dapat diukur atas dasar (1) *generalized trust*, (2) *norms*, (3) *reciprocity*, dan (4) *networks* (Putnam, 2002). *Generalized trust* adalah inti dari modal sosial. *Generalized trust* adalah indikasi dari potensi kesiapan masyarakat untuk bekerjasama satu sama dengan yang lain. Rasa percaya dengan orang lain ialah kunci dalam bentuk macam partisipasi. Partisipasi tersebut bisa berupa bentuk kesukarelaan seseorang dalam menjadi anggota sebuah asosiasi atau kelompok-kelompok (Uslaner, 1999:131). Di dalam kelompok masyarakat tentunya ada norma-norma yang berlaku untuk menjaga hubungan sosial antar anggota kelompok atau sesama anggota masyarakat. Banyak seseorang ikut serta dalam berbagai macam partisipasi maka akan semakin mudah untuk mendapatkan akses informasi, dimana informasi tersebut akan lebih mudah didapatkan apabila memiliki jaringan yang banyak (Putman, 2002).

Dimensi modal sosial tumbuh pada masyarakat yang di dalamnya berisi nilai-nilai dan norma serta pola interaksi sosial untuk mengatur kehidupan keseharian anggotanya (Woolcock dan Narayan, 2000). Pendapat dari Adler dan Kwon (2000) menyatakan bahwa dimensi modal sosial merupakan gambaran dari keterkaitan internal yang mewarnai struktur kolektif dan memberikan keterkaitan satu sama lain dan keuntungan bersama dari proses sosial yang telah terjadi di dalam masyarakat. Ada beberapa acuan nilai dan unsur yang merupakan modal sosial antara lain: sikap berpartisipasi, sikap yang saling memperhatikan, saling member dan menerima, saling percaya dan mempercayai dan diperkuat oleh nilai-

nilai dan norma-norma yang mendukungnya. Unsur lain yang memegang peran penting ialah kemauan masyarakat untuk terus menerus proaktif baik dalam mempertahankan nilai, maupun membentuk jaringan kerja sama dengan ide-ide yang baru.

Oleh karena itu menurut Hasbullah (2006), dimensi inti dari modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat untuk bekerjasama membangun suatu jaringan guna mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang imbal balik dan saling menguntungkan serta dibangun diatas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan diatas prinsip-prinsip sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mendukungnya.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, dimensi modal sosial ialah kemampuan masyarakat untuk bisa bekerjasama untuk membangun jaringan sosial guna untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama yang dilakukan ialah untuk suatu pola hubungan timbal balik dan saling menguntungkan baik individu maupun kelompok yang dibangun atas modal sosial seperti kepercayaan, nilai, norma-norma yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut didukung adanya partisipasi antar masyarakat untuk menjalin hubungan yang baik, saling memberi, saling percaya mempercayai dan mematuhi nilai-nilai, norma-norma yang mendukung kerjasama.

2.2.4 Unsur-unsur Modal Sosial

Menurut pendapat Vipriyanti (2011) unsur-unsur modal sosial antara lain adalah:

1. Rasa percaya (*trust*)

Rasa percaya ialah dasar dari perilaku moral dimana modal sosial dibangun. Membangun rasa percaya adalah bagian proses yang dibangun sejak awal dalam suatu keluarga. Rasa percaya akan memudahkan terjalinnya suatu kerjasama. Semakin adanya kepercayaan maka akan semakin kuat kerjasama yang terjalin didalam masyarakat. Selanjutnya dinyatakan bahwa kepercayaan sosial muncul dari hubungan yang bersumber pada norma resiprositas atau hubungan

timbal balik dan jaringan keja dari keterkaitan dalam warganegara. Rasa percaya menjadikan tidak dibutuhkan aktivitas *monitoring* terhadap perilaku orang lain, agar orang tersebut bertindak sesuai dengan yang diinginkan.

Kepercayaan ditentukan oleh *homogeneity*, dimana komposisi populasi dan tingkatan ketidaksamaan, rasa percaya yang tinggi ditemukan pada wilayah dengan ras dan komposisi populasi yang *homogeny* serta tingkat ketidaksamaan yang rendah. Sumber kepercayaan dapat dibedakan menjadi sumber makro dan sumber mikro. Artinya dalam sumber makro mencakup tentang Ketuhanan, etika, hukum. Sedangkan pada sumber mikro berhubungan dengan penyusunan kelembagaan.

2. Norma (*share value*)

Norma merupakan nilai bersama yang mengatur perilaku individu dalam suatu masyarakat ataupun kelompok. Menurut Fukuyuma (dikutip dari Vipriyanti 2011), menyatakan modal sosial sebagai norma informal yang bersifat instan yang dapat mengembangkan kerjasama antar dua atau lebih individu, norma mengatur individu ataupun kelompok dapat membuat seseorang individu menjaga sikap serta tingkah lakunya dalam kelompok keharmonisan kelompok agar tetap terjaga.

3. Jaringan kerja (*Network*)

Jaringan kerja pada awalnya merupakan system dari saluran komunikasi (*system of communication channel*) untuk melindungi dan mengembangkan hubungan interpersonal. Jaringan kerja sangat berperan penting dalam membangun sebuah koalisi dan terkordinasi, dengan adanya jaringan kerja koalisi dan kordinasi akan terjalin lebih kokoh, hal ini diakibatkan koalisi terbentuk dikarenakan kepentingan yang sama maka otomatis akan lebih mudah melakukan koordinasi.

Jaringan kerja dibutuhkan karena perlu adanya koordinasi dan pengurutan kegiatan-kegiatan kelompok yang kompleks, yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain. Hal ini dilakukan secara sistematis, sehingga dapat memperoleh efesiensi kerja. Pentingnya jaringan ini adalah menimbulkan komitmen dari setiap unsur yang terkait dengan menempatkan setiap individu pada jejaring tersebut serta menjadi jembatan penghubung antara individu dengan kehidupan kelompok lainnya.

Pendapat lain mengenai unsur-unsur modal sosial menurut Hasbullah (2006) ada 6 poin yaitu:

1. *Participation in a network*, Kemampuan sekelompok orang untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial, melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas dasar prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), dan keadaban (*civility*), kemampuan anggota kelompok atau anggota masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola yang hubungan sinergis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok.
2. *Reciprocity*, Kecendrungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran terjadi dalam suatu kombinasi jangka panjang dan jangka pendek dengan nuansa altruisme tanpa mengharapkan imbalan. Pada masyarakat dan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk yang memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi.
3. *Trust*, Suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung. Setidaknya dalam suatu kelompok tidak saling merugikan diri dan kelompoknya. Tindakan kolektif yang didasari saling percaya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk dan dimensi terutama dalam konteks kemajuan bersama. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk bersatu dan memberikan kontribusi pada peningkatan sosial.
4. *Social norm*, Sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dan suatu entitas tertentu. Aturan-aturan ini biasanya terinstitusionalisasi, tidak tertulis tapi dipahami sebagai penentu pola tingkah laku yang baik dalam konteks hubungan sosial sehingga sanksi sosial yang diberikan jika melanggar. Norma sosial akan menentukan kuatnya hubungan antar individu karena merangsang kohesivitas sosial yang berdampak positif bagi perkembangan masyarakat. Oleh karenanya norma sosial disebut sebagai salah satu modal sosial.

5. *Values*, Sesuatu ide yang telah turun menurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Nilai merupakan hal yang penting dalam kebudayaan, biasanya ia tumbuh dan berkembang dalam mendominasi kehidupan kelompok masyarakat tertentu serta aturan-aturan bertindak dan berperilaku masyarakat yang ada akhirnya membentuk pola cultural.
6. *Proactive action*, Keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan anggota kelompok dalam suatu keinginan masyarakat. Anggota kelompok melibatkan diri dan mencari kesempatan yang dapat memperkaya hubungan-hubungan sosial dan menguntungkan kelompok. Perilaku inisiatif dalam mencari informasi berbagai pengalaman, memperkaya ide, pengetahuan, dan beragam bentuk inisiatif lainnya baik oleh individu maupun kelompok, merupakan wujud modal sosial yang berguna dalam masyarakat.

Dari berbagai unsur-unsur modal sosial diatas dapat disimpulkan bahwa, unsur-unsur modal sosial secara umum ialah nilai-nilai dan norma untuk dipatuhi didalam kelompok masyarakat, partisipasi, kepercayaan, dan jaringan sosial dalam unsure-unsur modal sosial tesebut digunakan untuk terjalinnya kerjasama yang baik antar kelompok masyarakat. Unsur-unsur tersebut dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat, dengan adanya modal sosial didalam kelompok masyarakat pasti semua akan terlihat mudah. Dalam modal sosial adanya kerjasama antar kelompok. Tetapi, masing-masing unsur modal sosial yang dimiliki oleh kelompok tentunya berbeda-beda sesuai dengan individu masing-masing di dalam kelompok tersebut.

2.2.5 Tipologi Modal Sosial

Memiliki perhatian terhadap modal sosial pada umumnya tertarik untuk mengkaji kerekatan hubungan sosial dimana masyarakat terlibat didalamnya, terutama kaitanya dengan pola-pola interaksi sosial atau hubungan sosial antar anggota masyarakat atau kelompok dalam suatu kegiatan sosial. Dimensi lain yang sangat menarik perhatian adalah berkaitan dengan tipologi modal sosial, yaitu perbedaan pola-pola interaksi berikut konsekuensinya antara modal sosial yang berbentuk *Bonding*, *Bridging* dan *linking*.

1. Modal sosial terikat (*Bonding Sosial Capital*)

Modal sosial terikat adalah cenderung bersifat eksklusif (Hasbullah, 2006). Yang menjadi karakteristik dasar yang melekat pada tipologi ini, sekaligus sebagai ciri khasnya, dalam konteks ide, relasi dan perhatian adalah lebih berorientasi ke dalam (*inward looking*) dibandingkan dengan berorientasi keluar (*outward looking*). Ragam masyarakat yang menjadi anggota kelompok ini pada umumnya homogenius (cenderung homogen).

Di dalam bahasa lain *bonding social capital* ini dikenal pula sebagai ciri *sacred society*. Menurut Putman (1993), pada masyarakat *sacred society* dogma tertentu mendominasi dan mempertahankan struktur masyarakat yang totalitarian, hierarchical, dan tertutup. Di dalam pola interaksi sosial sehari-hari selalu dituntun oleh nilai-nilai dan norma-norma yang menguntungkan.

Hasbullah (2006) menyatakan, pada masyarakat yang *bonded* atau *inward looking* atau *sacred*, meskipun hubungan sosial yang tercipta memiliki tingkat kohesifitas yang kuat, akan tetapi kurang merefleksikan kemampuan masyarakat tersebut untuk mencapai dan memiliki modal sosial yang kuat. Kekuatan yang tumbuh sekedar dalam batas kelompok dalam keadaan tertentu, struktur hierarki feodal, kohefistitas yang bersifat *bonding*. Salah satu kekhawatiran banyak pihak selama ini ialah terjadinya penurunan keanggotaan dalam perkumpulan atau asosiasi, menurunnya ikatan kohefistitas kelompok, terbatasnya jaringan-jaringan sosial yang dapat diciptakan, emnurunnya saling mempercayai dan hancurnya nilai da norma sosial yang tumbuh dan berkembang pada suatu entitas sosial.

2. Modal sosial yang menjembatani (*Bridging Social Capital*)

Hasbullah (2006), bentuk modal sosial yang menjembatani atau *Bridging Social Capital* ini biasa juga disebut bentuk modern dari suatu pengelompokan, group, asosiasi, atau masyarakat. Prinsip-prinsip perorganisasian yang dianut didasarkan pada prinsip-prinsip universal tentang: a) persamaan, b) kebebasan, serta c) nilai-nilai kemajemukan dan humanitarian (kemanusiaan, terbuka, dan mandiri).

Prinsip persamaan, bahwasannya setiap anggota dalam suatu kelompok masyarakat memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama. Setiap keputusan kelompok berdasarkan kesepakatan yang egaliter dari setiap kelompok. Pimpinan

kelompok masyarakat hanya menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan oleh para anggota kelompok.

Prinsip kebebasan, bahwa setiap anggota kelompok bebas berbicara, mengemukakan pendapat dan ide yang dapat mengembangkan kelompok tersebut. Iklim kebebasan yang tercipta memungkinkan ide-ide kreatif muncul dari dalam (kelompok, yaitu beragam pikiran anggotanya yang kelak akan memperkaya ide-ide kolektif yang tumbuh dalam kelompok masyarakat.

Prinsip kemajemukan dan humanitarian, bahwasanya nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi setiap anggota dan orang lain yang merupakan prinsip dasar dalam pengembangan asosiasi, group, kelompok, atau suatu masyarakat. Kehendak kuat untuk membuat orang lain, merasakan penderitaan orang lain, berempati terhadap situasi yang dihadapi orang lain, adalah termasuk dalam dasar-dasar ide humanitarian.

Bentuk modal sosial yang menjembatani (*Bridging capital social*) umumnya mampu memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kemajuan dan kekuatan masyarakat. Hasil-hasil kajian di banyak Negara menunjukkan bahwa dengan tumbuhnya bentuk modal sosial yang menjembatani ini memungkinkan perkembangan di banyak dimensi kehidupan, terkontrolnya korupsi, semakin efesiennya pekerjaan-pekerjaan pemerintah, mempercepat keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan, kualitas hidup manusia akan meningkat dan bangsa menjadi lebih kuat.

3. Modal sosial jaringan (*Linking social capital*)

Menurut Abdullah (2013), Untuk pengembangan suatu komunitas diperlukan berbagai potensi dan sumber daya baik secara internal maupun eksternal. Modal sosial khususnya jaringan dan relasi-relasi merupakan potensi yang dapat mensinergikan dan mengungkapkan potensi dan modal lainnya. Potensi modal jaringan dan relasi menjadi inti dalam dinamika pembangunan suatu komunitas. Kompleksitas jaringan dan relasi yang tercipta dalam suatu komunitas merupakan salah satu indikator kekuatan yang dimiliki komunitas. Jaringan dan relasi tidak hanya terbatas pada yang bersifat horizontal, tapi juga bersifat vertical, oleh karena itu semua bentuk jaringan dan relasi menjadi penting untuk diperluas sebagai uapaya dinamis bagi komunitas dalam mengatasi masalah yang dihadapi.

Menurut Kearns(2004), Menyatakan bahwa relasi-relasi sosial antar individu-individu dan kelompok-kelompok dalam strata sosial yang berbeda secara hirarkis disebut dengan *linking social capital*. Modal sosial bersifat linking tersebut ialah menunjukkan suatu bentuk kekuatan komunitas, persoalannya adalah bagaimana potensi tersebut bisa di optimalkan. Potensi tersebut sangat ditentukan oleh *trust* dan norma-norma yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Dimana inti dari kekuatan sosial terletak pada tingginya kepercayaan dimiliki dan ketaatan terhadap norma oleh anggota dalam komunitas.

2.2.6 Tenaga Kerja

Konsep tenaga kerja memiliki beberapa definisi, salah satunya berdasarkan UU No. 25 tahun 1997, tenaga kerja adalah tiap orang laki-laki maupun perempuan yang sedang atau melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tenaga kerja menurut Simantuntak (2001) adalah *man power* atau orang yang merupakan berada dalam usia kerja. Tenaga kerja tersebut merupakan salah satu dari sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia mengandung dua pengertian, pertama mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan pada seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, bahwa sumber daya manusia mampu untuk bekerja dalam memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Bahwa dalam bekerja dapat menghasilkan nilai ekonomis, yaitu kegiatan tersebut mampu menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mulyadi (2003) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika adanya permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Sukirno (2005:6) dilihat dari segi keahlian dan pendidikannya, tenaga kerja dibedakan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Tenaga kerja kasar adalah tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau rendahnya tingkat pendidikan dan tidak memiliki keahlian dalam suatu pekerjaan.

2. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dari pelatihan atau pengalaman kerja.
3. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi dan ahli dalam bidang ilmu tertentu.

Dari beberapa kutipan yang menjelaskan pengertian tentang tenaga kerja, maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang memiliki tenaga kerja yang individu. Setiap individu melakukan pekerjaan untuk kebutuhan yang beranekaragam sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup seseorang seseorang perlu bekerja, baik bekerja dengan membuat usaha sendiri ataupun bekerja kepada orang lain. Dengan adanya tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada dan mengharuskan bekerja agar mendapatkan upah untuk biaya hidup.

2.2.7 Pekerja Migran Wanita (PMW)

Menurut Sukesu (2002), menjelaskan bahwa bekerja dan berusaha merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk pekerjaan tertentu, secara fisik maupun managerial atau pengolahan. Pekerjaan yang dimaksud dapat dibedakan menjadi dua yaitu, pekerjaan yang menghasilkan nilai uang atau barang dan menghasilkan nilai guna atau jasa. Sukesu (2002) kesempatan kerja adalah sejauh mana tenaga kerja menyerap atau terlibat dalam suatu kegiatan bekerja. Kesempatan kerja berlaku pada setiap individu baik itu pada wanita maupun laki-laki. Kesempatan kerja bagi wanita merupakan tingkat sejauh mana wanita terlibat dalam suatu aktivitas kerja, yang diukur dengan banyaknya tenaga kerja wanita yang terserap dalam aktivitas kerja secara fisik. Sedangkan kesempatan berusaha bagi wanita yaitu sejauh mana keterlibatan wanita dalam mengelola suatu usaha. Kesempatan bekerja dan berusaha dibidang mencari nafkah ditentukan oleh ketersediaan sumber-sumber pekerja dan kebutuhan seseorang dalam memperoleh penghasilan dari aktivitas kerja yang telah dilakukan.

Menurut Soedijoprato (1982), menjelaskan bahwa TKW atau bisa disebut Pekerja Migran Wanita (PMW) merupakan setiap wanita yang mampu melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar hubungan kerja yang berguna untuk menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak hanya buruh wanita, karyawati atau pegawai wanita yang merupakan tenaga, tetapi

mereka juga yang bekerja mandiri. Tenaga kerja tersebut sangat penting bagi perekonomian Negara. Sedangkan angkatan kerja wanita ialah jumlah penduduk wanita yang berumur sepuluh tahun melakukan kegiatan bekerja (paling sedikit satu jam perhari dalam satu minggu), sementara yang tidak bekerja untuk mencari pekerjaan.

Menurut Handuni (1994), kehadiran wanita ialah sebagai salah satu potensi pembangunan dan dirasakan mendesak, karena pada saat ini Indonesia berada dalam situasi penting yaitu mewujudkan pembangunan. Partisipasi wanita dibedakan menjadi dua yaitu sebagai peran tradisi dan transisi. Peran tradisi yaitu peran wanita sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga, sedangkan pada peran transisi yaitu peran wanita sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat dan masyarakat pembangunan. Menurut Sedijoprpto (1982) ada beberapa pendorong wanita untuk ikut bekerja antara lain adalah:

1. Karena keharusan ekonomi
2. Karena didorong keinginan untuk membentuk karir
3. Karena pembangunan memerlukan tenaga kerja dan wanita merupakan sumberdaya manusia.

Alasan yang menyebabkan wanita bekerja ialah: (1) Karena kebutuhan ekonomi, dalam hal ini dijelaskan bahwa kebiasaan perempuan Indonesia setelah kawin terdorong untuk bekerja, terutama jika mereka mengetahui bahwa penghasilan suami tidak mencukupi untuk keluarga, (2) Alasan sosial-psikologis, terutama bagi perempuan yang mempunyai pendidikan lebih tinggi, pada umumnya terdorong menggunakan kemampuan yang ada, (3) Kebutuhan pangan nasional, yaitu berkaitan dengan konsep pembangunan nasional bahwa dibutuhkan partisipasi seluruh warga termasuk perempuan. (Partini, 1990).

Dari beberapa kutipan yang menjelaskan pengertian tentang tpekerja migran wanita (PMW), maka dapat disimpulkan bahwa pekerja migran wanita (PMW) memiliki kemampuan untuk bekerja menghasilkan barang maupun jasa. Pendorong wanita bekerja salah satunya untuk membantu perekonomian keluarga, selain wanita hanya sebagai ibu rumah tangga dan mengurus yang ada di rumah tangga. Wanita terkadang bekerja juga membantu suami untuk mendorong perekonomian rumah tangga mereka.

2.2.8Buruh Migran Purna

BMI Purna (pasca migran) menunjukkan ketika kembali ke Indonesia tidak semua BMI purna siap bekerja mandiri di dalam negeri, karena etos kerja yang dibangun di luar negeri adalah sebagai pekerja bukan pengusaha, sementara tidak ada uang yang dibawa pulang ke Indonesia disebabkan tidak adanya tabungan selama bekerja (Sukei, dkk, 2012; Wijaya, 2012).

Hal ini disebabkan karena tidak semua BMI purna berkemampuan untuk memanfaatkan uang yang diperoleh dari bekerja di luar negeri sebagai modal berwirausaha, demikian pula dengan keluarganya. Hasil penelitian Sukei (2012) menunjukkan bahwa BMI yang ketika berangkat ke luar negeri telah memiliki wawasan kewirausahaan akan mampu mengelola hasil kerjanya sebagai modal usaha.

2.2.9Pengertian Entrepreneurship

Entrepreneurship merupakan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan memanfaatkan waktu dan kegiatan, disertai dengan membuka usaha membutuhkan modal dan menanggung resiko-resiko yang ada, serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi atas usaha tersebut.

Entrepreneur adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru di tengah banyaknya resiko dan ketidakpastian sebagai sebuah tujuan untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan mengidentifikasi peluang dan mengumpulkan sumber daya yang penting sebagai modal utama (Zimmerer, Scarborough, 2002).Banyak pemilik usaha kecil mengkarakteristikkan dirinya sebagai seorang Entrepreneur atau wirausaha, tetapi banyak dari mereka yang tidak terlalu menginginkan untuk memperluas usahanya seperti usaha-usaha lainnya.Seorang Entrepreneur kebanyakan memakai ide inovatif dan kreatif dan strategi-strategi lainnya untuk memotivasi sehingga usahanya tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut Michael Harris (2000:19), Wirausaha yang berhasil pada umumnya adalah mereka yang memiliki kompetensi, yaitu memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kualitas individual yang meliputi sikap, motivasi, nilai-nilai pribadi, serta tingkah laku yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan.

Menurut Suryana (2009), Dalam kewirausahaan, modal tidak hanya identik dengan modal yang berwujud seperti uang dan barang, tetapi juga modal yang tidak berwujud seperti modal intelektual, modal sosial, modal moral, dan modal mental. Modal kewirausahaan dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. Modal intelektual, dapat diwujudkan dalam bentuk ide-ide sebagai modal utama yang disertai pengetahuan, kemampuan, keterampilan, komitmen, dan tanggung jawab sebagai modal tambahan. Ide merupakan modal utama yang akan membentuk modal lainnya.
2. Modal sosial dan Modal Moral, dapat diwujudkan dalam bentuk kejujuran dan kepercayaan sehingga dapat terbentuk citra. Seorang wirausaha yang baik biasanya memiliki etika wirausaha seperti kejujuran, integritas, menepati janji, kesetiaan, kewajaran, suka membantu, menghormati orang lain, warga Negara yang baik dan taat hukum, dan bertanggung jawab.
3. Modal mental adalah kesiapan mental yang wujudkan dalam bentuk keberanian untuk menghadapi resiko dan tantangan.
4. Modal material adalah modal dalam bentuk uang atau barang. Modal ini terbentuk apabila seseorang memiliki jenis-jenis modal diatas.

Disimpulkan bahwa seorang Entrepreneur ialah selain memakai modal dan menanggung resiko yang ada. Seorang Entrepreneur seharusnya juga memakai ide yang kreatif dan inovatif untuk mengembangkan usahanya. Sehingga dengan ide-ide yang luas seorang wirausaha harus memikirkan lebih optimal untuk usahanya agar tidak mengalami resiko kedepannya. Akan tetapi seorang entrepreneur harus siap dengan resiko-resiko yang ada dalam usaha. Selain menggunakan modal berupa uang dan barang, diharapkan juga menggunakan modal sosial seperti kepercayaan, nilai dan norma, dan jaringan sosial didalam usaha. Sehingga usaha tersebut bisa berjalan lancar dengan adanya kerjasama antar kelompok.

2.2.10 Definisi Usaha Ekonomi Produktif

Menurut peraturan Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan RI No.Per-19/BP/2005, mendefenisikan Usaha Ekonomi Produktif adalah serangkaian kegiatan yang ditunjukan untuk meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Kegiatan kerja ekonomi produktif merupakan suatu kegiatan

keterampilan usaha dan terampil kerja yang dilaksanakan untuk memperoleh penghasilan (Hardianti, 2009). Dapat disimpulkan, usaha ekonomi produktif adalah suatu upaya secara ekonomi untuk menghasilkan dan meningkatkan potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu contoh Usaha Ekonomi Produktif di Pedesaan ialah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi (Tambunan 2012:2).UMKM telah menyelamatkan kondisi perekonomian Indonesia.Karena mampu menyerap tenaga kerja pada saat pengangguran atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).UMKM juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.Setiap Negara memiliki definisi dan konsep UMKM yang berbeda-beda secara umum sebuah usaha mikro mengerjakan lima atau kurang pekerja tetap, Sedangkan usaha kecil menengah bisa berkisaran antara kurang dari 100 pekerja, misalnya di Indonesia. Selain menggunakan klasifikasi jumlah pekerja, banyak Negara yang juga menggunakan nilai asset tetap (misalnya tidak termasuk gedung dan tanah) dan omset dalam UMKM (Tambunan, 2009).Di Indonesia, definisi UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi menurut UU no. 20 Tahun 2008 adalah :

1. Usaha Mikro ialah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut.
2. Usaha kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak dari perusahaan atau bukan cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah ataupun usaha besar yang telah memenuhi kriteria dalam usaha kecil.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan.

Dapat disimpulkan pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ialah banyak orang yang ingin membuka usaha untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Baik itu usaha kecil, menengah dan usaha makro. Untuk membuka usaha terlebih dahulu yang dibutuhkan ialah modal agar bisa membuka suatu usaha. Meningkatnya suatu usaha dibutuhkan jaringan-jaringan sosial yang ada didalam masyarakat. Sehingga usaha bisa berkembang dengan adanya kerja sama.

Pengembangan UMKM di Indonesia belum secara maksimal dan masih banyak terdapat kendala. Ada dua faktor yang dapat menghambat perkembangan UMKM yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Menurut (Wahyuni dkk, 2005), Faktor Internal yang dapat menghambat perkembangan UMKM meliputi:

a. Kurangnya permodalan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu usaha. Kurangnya permodalan pada UMK, karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang bersifat tertutup, yang menggunakan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjam dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh pihak bank tidak dapat terpenuhi.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengolahan usahanya, sehingga usaha akan sulit untuk dikembangkan dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

c. Lemahnya jaringan usaha

Usaha kecil yang pada umumnya ialah unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah,

oleh karena itu produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan memiliki kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah memiliki jaringan dan teknologi pendukung untuk dapat mempromosikan dengan baik.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan UMKM meliputi:

a. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif

Iklim usaha yang kondusif adalah iklim yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang tinggi (Tambunan, 2006). Kebijakan Pemerintah untuk mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar.

b. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang telah diharapkan.

c. Implikasi Otonomi daerah

Pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan berupa uang yang dikenakan pada Usaha kecil dan Menengah (UKM). Jika kondisi ini tidak segera diatasi maka akan menurunkan daya saing pada usaha tersebut. Disamping itu motivasi kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usaha didaerahnya tersebut.

2.3 Kerangka Pemikiran

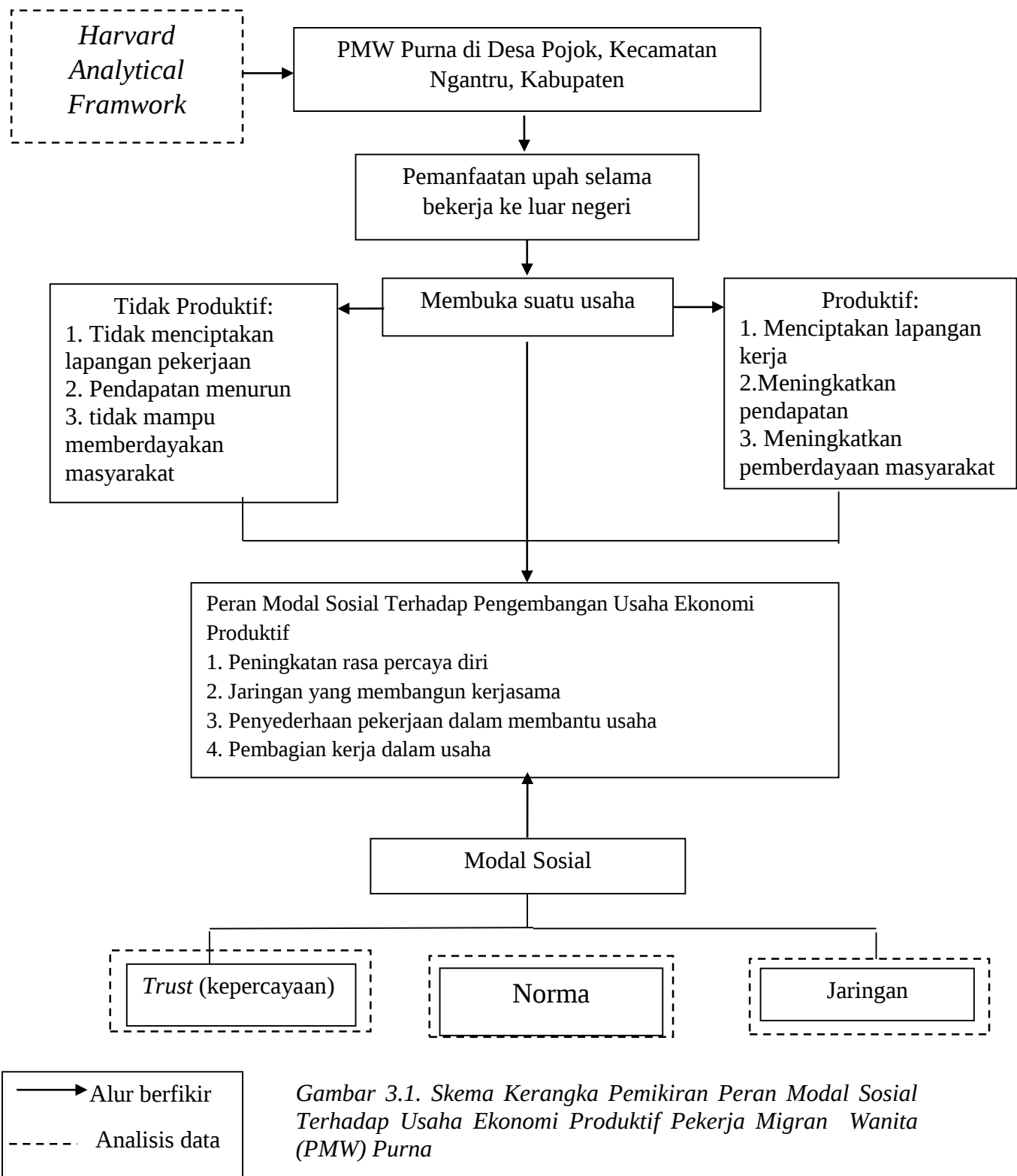
Pekerja migran wanita (PMW) merupakan setiap wanita yang mampu melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja yang berguna untuk menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak hanya buruh wanita, karyawati atau pegawai wanita yang merupakan tenaga kerja, tetapi mereka juga

yang bekerja mandiri. Fenomena wanita bekerja menjadi hal menarik untuk dikaji, terutama wanita dipedesaan. Keterlibatan wanita bekerja untuk sebagian besar untuk mencukupi kebutuhan perekonomian rumah tangga. Tenaga kerja tersebut sangat penting bagi perekonomian Negara. Sedangkan angkatan kerja wanita ialah jumlah penduduk wanita yang berumur sepuluh tahun melakukan kegiatan bekerja (paling sedikit satu jam sehari dalam satu minggu), sementara yang tidak bekerja untuk mencari pekerjaan.

Menurut (Sukesi, dkk, 2012; Wijaya, 2012), Penelitian pada BMI purna menunjukkan ketika kembali ke Indonesia tidak semua BMI purna siap bekerja mandiri di dalam negeri, karena etos kerja yang dibangun di luar negeri adalah sebagai pekerja bukan pengusaha, sementara tidak ada uang yang dibawa pulang ke Indonesia disebabkan karena tidak adanya tabungan selama bekerja. Hal ini disebabkan karena tidak semua BMI purna yang berkemampuan memanfaatkan uang yang diperoleh dari bekerja di luar negeri sebagai modal berwirausaha, demikian pula dengan keluarganya. Menurut Sukesi (2012), menunjukkan bahwa BMI yang ketika berangkat ke luar negeri telah memiliki wawasan kewirausahaan akan mampu mengelola hasil kerjanya sebagai modal berwirausaha. Usaha ekonomi produktif adalah perbuatan atau kegiatan di bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh rumah tangga atau kelompok usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja. Beberapa indikator keberhasilan usaha ekonomi produktif seperti, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dalam membuka usaha ekonomi dibutuhkan modal sosial untuk terjalannya kerjasama antar kelompok masyarakat.

Modal sosial mengacu pada esensi dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma dan jaringan sosial yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan yang lebih terkoordinasi, dan anggota kelompok mampu berpartisipasi dan kerjasama secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama, dan mempengaruhi produktivitas secara individual maupun secara kelompok. Adanya modal sosial ialah sebagai salah satu kerjasama untuk mendukung suatu kewirausahaan agar suatu usaha bisa berkembang dengan menjalankan modal sosial yang ada.

Pemanfaatan modal sosial sebagai pengembangan suatu usaha dapat membuat suatu hubungan akan semakin kuat dan erat. Modal sosial seperti, kepercayaan, norma dan jaringan. Kepercayaan merupakan harapan yang tumbuh didalam masyarakat seperti adanya perilaku jujur, bersikap dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang telah dibuat bersama. Rasa percaya diri adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan senantiasa akan bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan merugikan diri dan kelompok. Norma merupakan nilai-nilai, harapan-harapan, tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma tersebut dibangun dan dikembangkan berdasarkan kerjasama yang telah dijalani orang sekelompok orang. Norma juga merupakan prakondisi maupun produk dari kepercayaan sosial, Sedangkan jaringan merupakan infrastruktur dinamis dari kapital sosial yang berwujud jaringan-jaringan kerjasama antar manusia. Jaringan memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat jaringan. Berdasarkan uraian diatas, secara sistematis dapat dibuat skema kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Gambar 3.1. Skema Kerangka Pemikiran Peran Modal Sosial Terhadap Usaha Ekonomi Produktif Pekerja Migran Wanita (PMW) Purna

2.7 Definisi Operasional

1. Modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja sama, demi mencapai tujuan-tujuan bersama di dalam berbagai kelompok maupun organisasi. Dalam penelitian ini modal sosial diperlukan untuk mengembangkan usaha sehingga usaha tersebut dapat berjalan dengan baik.
2. Kepercayaan adalah rasa percaya atau sikap saling percaya yang terjalin didalam masyarakat. Adanya kepercayaan didalam masyarakat maka akan memudahkan suatu kerjasama. Kepercayaan melihat hubungan yang terjalin antara PMW purna dengan orang disekitar. Seperti kepercayaan pada teman, kerabat ataupun anggota keluarga.
3. Norma adalah peraturan yang telah dibuat oleh masyarakat ataupun kelompok untuk dipatuhi. Norma melihat dalam pembagian kerja atau aturan yang telah dijanjikan pada PMW purna dengan orang lain.
4. Jaringan adalah saluran komunikasi dan interaksi antar sesama kelompok masyarakat untuk membangun kerjasama yang terkoordinasi.
5. Kerjasama adalah usaha yang dilakukan bersama dan membutuhkan bantuan orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
6. Pelatihan adalah suatu proses yang terencana dengan menggunakan teknik tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang ataupun kelompok.
7. Usaha ekonomi produktif adalah suatu upaya secara ekonomi untuk menghasilkan dan meningkatkan potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup.
8. Pekerja migran wanita (PMW) adalah setiap wanita yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang maupun jasa.
9. Pekerja migran wanita ke luar negeri adalah untuk bekerja dan mencukupi perekonomian rumah tangga.